

ABSTRAK
PELAKSANAAN MONITORING REALISASI KEUANGAN PEMERINTAHAN
KOTA BINJAI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
(Studi pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Binjai)

Novi Kesumawati Br. Lubis*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H***

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring dan evaluasi, maka perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan dan acuan pada bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam Perencanaan, monitoring dan evaluasi suatu kegiatan. Tujuan penelitian ini antar lain: untuk mengetahui pengaturan kewenangan monitoring pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Kota Binjai; kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan monitoring realisasi keuangan dalam penggunaan APBD serta pelaksanaan monitoring realisasi keuangan Pemerintahan Kota Binjai.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Berdasarkan pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 25 huruf h yang menyatakan: Kepala Subbagian Pengendalian Program mempunyai tugas: melaksanakan monitoring dengan menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan dari unit kerja pengelola dan pembangunan. Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.(Pasal 24 Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai). Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan monitoring realisasi keuangan dalam penggunaan APBD adalah penetapan APBD tidak tepat waktu sehingga monitoring tidak maksimal dilaksanakan padahal penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar sehingga memudahkan Kasubbag Administrasi Pembangunan dalam melakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan APBD. Pelaksanaan monitoring realisasi keuangan pemerintah Kota Binjai dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Agar tepat waktu dalam pelaporan untuk implementasi mengingatkan kepada pihak OPD.

Kata Kunci: Monitoring, Realisasi Keuangan, APBD, Pemko Binjai

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Pembimbing I

***Pembimbing II

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF MONITORING THE FINANCIAL REALIZATION OF THE
BINJAI CITY GOVERNMENT IN THE USE OF THE REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET
(Study at the Regional Secretariat of Binjai City Government)

Novi Kesumawati Br. Lubis*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H***

Monitoring and evaluation is one way to find out deficiencies, weaknesses and strengths in terms of planning and implementing activities/programs. Therefore, considering the large importance of monitoring and evaluation, it is necessary to have a guideline that serves as a guide and reference for the development administration section of the Binjai City Regional Secretariat to carry out tasks and functions in planning, monitoring and evaluating an activity. The objectives of this research include: to determine the regulatory authority for monitoring regional financial management of the Binjai City Government; Obstacles faced by the Binjai City Government in implementing monitoring of financial realization in the use of APBD as well as implementing monitoring of financial realization of the Binjai City Government.

This research is descriptive in nature with a qualitative approach. The types of legal research used are normative juridical and empirical legal research with a statutory approach and a concept analysis approach.

The results of the research are as follows: Based on Binjai Mayor Regulation Number 4 of 2020 Article 25 letter h which states: The Head of the Program Control Subdivision has the task of: carrying out monitoring by collecting physical and financial realization reports from management and development work units. The Head of Subdivision who in carrying out his duties is under and is responsible to the Head of Division. (Article 24 of Binjai Mayor Regulation Number 4 of 2020 concerning Duties, Functions and Work Procedures of the Binjai City Regional Secretariat). The obstacles faced by the Binjai City Government in implementing monitoring of financial realization in the use of the APBD are the determination of the APBD not on time so that monitoring is not carried out optimally even though the determination of the APBD must be carried out on time so that planned activity and development programs are realized in the fiscal year so that public services are provided to the community can run smoothly, making it easier for the Head of Development Administration Subdivision to monitor the realization of the use of the APBD. Implementation of monitoring of the financial realization of the Binjai City government is carried out in the form of examination of Financial Reports as stated in the provisions of Law Number 23 of 2014, including: Budget Realization Report; Over budget balance change report; Balance Sheet; Operational; Cash flow statement; Statement of Changes in Equity; and Notes on Financial Reports attached with a summary of BUMD's financial reports. To ensure timely reporting for implementation, remind the OPD.

Key Word : Monitoring, Financial Realization, APBD, Binjai City Government

* Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Mentor I

***Mentor II